

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Situasi politik Venezuela pasca pemilu dan hubungan antara AS dan Venezuela yang kompleks terutama karena perbedaan ideologi mengancam kepentingan AS dalam kawasan dan kepentingan AS dalam politik global. Keamanan merupakan pilar utama AS dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Melalui pembentukan perjanjian *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta hak sosial dan budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) oleh Komisi HAM PBB pada 1951 yang akhirnya menjadi acuan untuk pemberlakuan norma – norma internasional yakni pengedepanan nilai – nilai HAM dalam pelaksanaan kebijakan dan segala tindakan politik, menjadi landasan kuat bagi AS untuk melayangkan sanksi internasional terhadap Venezuela berdasarkan situasi dalam proses dan pasca pemilu Venezuela tahun 2018 dan 2024. Segala kebijakan luar negeri dan tindakan politik suatu negara secara tidak langsung harus dilandasi dengan norma – norma internasional yang berlaku sehingga meminimalisir adanya gesekan kepentingan dan resiko terjadinya konflik antar negara.

Pelaksanaan pemilu hingga pemutusan hasil yang tidak transparan dan penanganan protes masyarakat yang diatasi dengan kekerasan, membuat AS menjatuhkan empat bentuk sanksi internasional terhadap Venezuela yaitu sanksi ekonomi, politik, militer dan diplomatik. Dengan keotoriteran rezim Maduro dan tindak kekerasan dalam penanganan protes masyarakat, AS berupaya menjatuhkan

sanksi internasional untuk merubah perilaku rezim Maduro dan memaksa Maduro menjalankan proses pemilihan umum dengan nilai – nilai demokrasi yang bebas dan adil. Melalui banyaknya sanksi yang AS jatuhkan dan sektor – sektor fundamental yang dijatuhkan dalam sanksi tersebut seperti pembatasan perdagangan dan kerjasama luar negeri dalam sektor minyak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pembatasan dan pencabutan visa, yang kemudian diklasifikasikan dalam sanksi ekonomi, penolakan pengakuan Maduro sebagai presiden yang sah sebagai sanksi politik, kontrol ekspor senjata AS terhadap Venezuela sebagai sanksi militer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pertahanan keamanan Venezuela dalam memasok alat – alat militer serta upaya kerja sama AS dengan negara lain untuk menegakkan keadilan dan nilai demokrasi dalam rezim Maduro sebagai sanksi diplomatik, belum mampu untuk menurunkan Maduro dalam jabatannya hingga saat ini. Namun, terlepas dari kepemimpinan Maduro yang masih menjabat hingga saat ini, sanksi ekonomi yang AS jatuhkan merupakan sanksi yang memiliki dampak nyata bagi kelangsungan kepentingan ekonomi dan militer Venezuela. Dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi, Venezuela mengalami lonjakan krisis ekonomi yang akhirnya membuat Venezuela beralih pada sektor tambang emas sebagai alternatif sumber pendapatan negara akibat pembekuan aset dan properti pemerintah Venezuela di wilayah AS termasuk larangan transaksi dengan PdVSA (perusahaan minyak nasional Venezuela).

## 4.2 Saran

Tantangan yang AS hadapi dalam aspek keamanan akibat konflik pemilu dan degradasi nilai – nilai demokrasi yang terjadi di Venezuela, dapat diatasi dengan penjatuhan sanksi terus menerus secara berkelanjutan untuk semakin meminimalisir perealisasi kepentingan nasional dan luar negeri Venezuela. Dengan penolakan pengakuan Maduro sebagai presiden yang terbukti tidak dapat membuat Maduro mundur dari jabatannya dan karena pengaruh otoritarian yang telah melekat kuat pada pemerintahan Venezuela, AS dapat secara terus menerus menekan Venezuela melalui sanksi ekonomi dan militer sebagai aspek fundamental keberlangsungan kepentingan suatu negara, yang mana juga telah terbukti mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dan penurunan investor kepada Venezuela akibat rentannya resiko terkena dampak sanksi yang AS berikan.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi pennisan, kajian, referensi dan hal hal lain yang berkaitan dengan sanksi internasional AS terhadap Venezuela di masa pemerintahan Maduro tahun 2018 hingga tahun 2024. Penulis berharap penelitian ini dapat dikembangkan dengan membahas lebih jauh mengenai implementasi sanksi internasional AS terhadap Venezuela di masa pemerintahan Maduro tahun 2018 hingga tahun 2024 yang masih harus diberlakukan hingga nilai – nilai demokrasi dalam tatanan pemerintahan Venezuela dapat membaik dan mengurangi migrasi masyarakat Venezuela yang terjadi akibat ketidakamanan secara ekonomi dan sosial.